



Buletin

ISEN

MULANG

edisi : 016 / Februari 2021

Buletin Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah



**HADIRI RAKORNAS KARHUTLA 2021 DI ISTANA NEGARA,
WAGUB KALTENG TERIMA PENGARAHAN DARI PRESIDEN**

3



**MENTERI PERTANIAN BERSAMA GUBERNUR KALTENG
TINJAU PETERNAKAN SAPI DI KABUPATEN SUKAMARA**

14



**GUBERNUR KALTENG DAMPINGI MENTAN TINJAU PANEN
PERDANA PADI DI KAWASAN FOOD ESTATE DESA GADABUNG**

18



**DITERBITKAN BERDASARKAN
SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Pelindung :

Gubernur Kalimantan Tengah

Penasehat :

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Pengarah :

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

Sekda Prov. Kalteng

Penanggung Jawab:

Kepala Biro Administrasi Pimpinan
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Pemimpin Redaksi:

Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan pada
Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Sekretaris Redaksi:

Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan pada Biro
Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Wakil Sekretaris Redaksi:

Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan pada Biro
Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Koordinator Distribusi :

Kepala Sub Bagian Penyediaan Materi Pimpinan pada
Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah

Redaktur :

Setya Sri Saryanta, Noriko Yunanto

Penyedia Bahan :

Rani Diah Anggraini

Staf Redaksi :

Dewi Yulianti, Dina Meitriana, Kamala Sri Y. R.,
Winda Paskanova, Renny Patrisia,
Nova Anggreni, Sophia Fitra Djangkan.

Fotografer :

Boy Irawan, Efendy, Eka Supriyaningsih, Joko Prabowo.

Layout :

Benito Zuares

Operator Komputer :

Kemala Sri Yadikawati Rasan

Alamat Redaksi :

Jl. RTA Milono No. 1 Palangka Raya

Telp/Fax (0536) 4200241

Ijin Penerbitan Khusus

No. 2114/SK/Dirjen PPG/STT/1995

DAFTAR ISI :

HADIRI RAKORNAS KARHUTLA 2021 DI ISTANA
NEGARA, WAGUB KALTENG TERIMA PENGARAHAN DARI
PRESIDEN____3

SEKDA KALTENG HADIRI RAPAT SOSIALISASI
PERMENDAGRI 6/2021 TENTANG TEKNIS GAJI DAN
TUNJANGAN PPPK VIA VICON____4

GUBERNUR SAMBUT BAIK PROSES PEMERIKSAAN BPK
RI PERWAKILAN PROVINSI KALTENG TERHADAP LKPD
TA 2020____5

RAPAT KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN KLHS FOOD
ESTATE JARING MASUKAN DAN TANGGAPAN____6

SEKDA DUKUNG UPAYA PENATAAN KEMBALI ASET-ASET
DAERAH KALTENG____7

INDONESIA UPAYAKAN RISET VAKSIN MERAH PUTIH
BERBASIS VIRUS COVID-19 YANG BEREDAR DI
INDONESIA____8

SATGAS PENANGANAN COVID-19: PERSENTASE TINGKAT
KESEMBUHAN COVID-19 KALTENG MENCAPAI 90%
LEBIH____9

SATGAS COVID-19 KALTENG BERHARAP BUPATI/WALI
KOTA DORONG TERCAPAINYA TARGET VAKSINASI____10

GUBERNUR KALTENG HADIRI PELETAKAN BATU
PERTAMA PEMBANGUNAN RS NU PROVINSI
KALTENG____11

MEWAKILI GUBERNUR, SEKDA FAHRIZAL FITRI BUKA
RAKORDA LPTQ SE-KALTENG TAHUN 2021____12

GUBERNUR SUGIANTO SABRAN BUKA KONFERWIL
BERSAMA PWNU, GP ANSOR, DAN FATAYAT NU
KALTENG____13

MENTERI PERTANIAN BERSAMA GUBERNUR
KALTENG TINJAU PETERNAKAN SAPI DI KABUPATEN
SUKAMARA____14

GUBERNUR SUGIANTO SABRAN LAKUKAN KUNJUNGAN
KERJA KE KABUPATEN SUKAMARA____15

KUATKAN UPAYA WUJUDKAN LUMBUNG PANGAN
NASIONAL, GUBERNUR KALTENG TINJAU KEMBALI
LAHAN FOOD ESTATE DI DESA BELANTI SIAM____16

GUBERNUR KALTENG TINJAU LOKASI PENGEMBANGAN
PERKEBUNAN SINGKONG DI KABUPATEN GUNUNG
MAS____17

GUBERNUR KALTENG DAMPINGI MENTAN TINJAU
PANEN PERDANA PADI DI KAWASAN FOOD ESTATE DESA
GADABUNG____18

FOTO-FOTO KEGIATAN PEMPROV. KALTENG____19

Redaksi menerima naskah tulisan dari Dinas, Badan, Instansi, Biro dan Kantor Unit Satuan Kerja baik berupa Artikel, Feature maupun Foto yang menunjang kemajuan Buletin Isen Mulang dan Redaksi berhak mengedit Naskah yang masuk. Kiriman Naskah Tulisan maupun Foto disampaikan ke Biro Adminidtrasi Pimpinan Setda Prov Kalteng Jl. RTA Milono No.1 Palangka Raya, Telp/Fax (0536) 4200241

Website : <http://biroadpim.kalteng.go.id/>

Facebook : <http://www.facebook.com/SetdaProvKalteng/>

Twitter : http://www.twitter.com/setda_kalteng

Instragram : @sekretariat.daerah.kalteng

email : buletin.isenmulang@gmail.com

HADIRI RAKORNAS KARHUTLA 2021 DI ISTANA NEGARA, WAGUB KALTENG TERIMA PENGARAHAN DARI PRESIDEN

JAKARTA – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2021 yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, bertempat di Istana Negara, Jakarta pada Senin (22/2/2021).

Turut pula diundang untuk mengikuti Rakornas Karhutla di Istana Negara ini, di antaranya Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad, Kapolda Kalteng Irjen Pol Dedi Prasetyo, Danrem 102/Panju Panjung Brigjen TNI Purwo Sudaryanto, dan Bupati Pulang Pisau Edy Pratowo. Selain Kalteng, diundang juga Kepala Daerah beserta Kapolda, Pangdam, dan Danrem dari 3 provinsi rawan Karhutla lainnya, yaitu Riau, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Barat.

Agenda Rakornas ini adalah untuk menerima pengarahan dari Presiden RI Joko Widodo mengenai upaya peningkatan penanganan dan pengendalian Karhutla di tahun 2021. Rakornas ini diselenggarakan secara hybrid, yaitu peserta dalam jumlah terbatas hadir langsung di Istana Negara (luring/offline) dan sebagian besar peserta lainnya mengikuti secara daring atau online melalui konferensi video.

Saat memberikan arahan, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan tidak boleh kendor, meskipun saat ini di beberapa daerah tengah menghadapi bencana banjir dan tanah longsor. “Kita harapkan sebuah rencana pencegahan yang matang, yang detail, sinergi semakin kuat, dan eksekusi lapangan yang semakin efektif,” tegas Presiden.

Presiden selanjutnya menerangkan bahwa berdasarkan laporan BMKG, tahun 2021 sebagian besar wilayah di Indonesia diperkirakan masih mendapatkan hujan menengah tinggi hingga bulan April, dan La Nina akan masih bertahan hingga semester I ini, serta bulan Mei diperkirakan akan menjadi fase transisi dari musim hujan ke musim kemarau. “Tapi, kita harus tetap waspada, jangan lengah,” ingat Presiden Joko Widodo.

Dijelaskan lebih lanjut, pada bulan Februari Pulau Sumatera diperkirakan berpotensi terjadi Karhutla, sementara potensi Karhutla di Pulau Kalimantan dan Sulawesi diperkirakan terjadi pada bulan Mei hingga Juli, serta akan mencapai puncaknya di bulan Agustus dan September. “Kita harus betul-betul tahu betul puncaknya kapan, sehingga persiapannya apa, dimulai dari sekarang. Planningnya disiapkan, organisasinya dicek betul, sudah bekerja atau tidak, pada saat betul-betul nanti panas, kita sudah siap semuanya,” ungkap Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo selanjutnya menekankan beberapa hal yang harus dilakukan oleh seluruh Kepala Daerah bersama Pangdam dan Kapolda serta jajaran



dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Presiden pun menandakan bahwa hal pertama yang harus benar-benar diprioritaskan adalah upaya pencegahan. “Sekali lagi prioritaskan pencegahan, jangan terlambat,” pungkas Presiden.

Tampak mendampingi Presiden dalam Rakornas Karhutla di Istana Negara ini, antara lain Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud M.D., Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Lebih lanjut, Rakornas Karhutla ini diikuti secara daring oleh para Gubernur, Pangdam, Kapolda, dan Danrem, serta Bupati/Wali Kota dari sejumlah provinsi lainnya, yakni Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. (set/setpres).



SEKDA KALTENG HADIRI RAPAT SOSIALISASI PERMENDAGRI 6/2021 TENTANG TEKNIS GAJI DAN TUNJANGAN PPPK VIA VICON



PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Fahrizal Fitri menghadiri Rapat Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang Bekerja pada Instansi Daerah melalui video conference (Vicon) dari Ruang Rapat Bajakah 2, Komplek Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya pada Rabu (10/2/2021).

Diterbitkannya Permendagri Nomor 6 Tahun 2021 tersebut adalah sebagai tindak lanjut untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Rapat sosialisasi yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini dipimpin oleh Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Bahri dan diikuti secara daring melalui konferensi video oleh para Sekda Provinsi/Kabupaten/Kota yang didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) masing-masing.

Pada kesempatan itu, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Bahri mengungkapkan bahwa Permendagri 6/2021 tersebut memuat sejumlah ketentuan, yaitu: (1) pengelolaan belanja pegawai bagi PPPK; (2) gaji, tunjangan, pemotongan pembayaran, dan syarat pembayaran PPPK; (3) penyelesaian pembayaran belanja pegawai; serta (4) pembinaan dan pengawasan.

Diterangkan lebih lanjut, PPPK diangkat dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai manajemen PPPK. Pembayaran belanja pegawai PPPK pada instansi daerah meliputi gaji dan tunjangan. "Pembayaran gaji dan tunjangan bagi PPPK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," terang Bahri.

Selanjutnya, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Bahri juga mengemukakan syarat untuk pembayaran gaji dan tunjangan bagi PPPK. "Gaji dan tunjangan PPPK dibayarkan setelah menandatangani perjanjian kerja, diterbitkan keputusan pengangkatan PPPK, dan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT," jelasnya.

Bahri kemudian menjelaskan bahwa Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) tidak diberlakukan dari tanggal penandatanganan perjanjian kerja dan penetapan keputusan pengangkatan menjadi PPPK. Selain itu, disampaikan pula bahwa pemberhentian pembayaran PPPK dilakukan terhitung bulan berikutnya apabila PPPK yang bersangkutan masa perjanjian kerjanya berakhir dan tidak diperpanjang, meninggal dunia, atau diberhentikan.

Turut mendampingi Sekda Kalteng mengikuti rapat sosialisasi tersebut, di antaranya Asisten Administrasi Umum Lies Fahimah, Kepala BKAD Nuryakin, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaspinor, serta Kepala BPSDM Sri Widanarni. (set/nov).

GUBERNUR SAMBUT BAIK PROSES PEMERIKSAAN BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALTENG TERHADAP LKPD TA 2020

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran menyambut baik seluruh proses pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalteng terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se-Kalteng Tahun Anggaran (TA) 2020. Demikian disampaikan Gubernur Sugianto Sabran dalam Entry Meeting Pemeriksaan Interim atas LKPD TA 2020 yang digelar secara virtual melalui video conference di Aula Serba Guna Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Senin (1/2/2021).

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Pemerintah Daerah se-Kalteng telah beberapa kali melakukan refocusing anggaran. “Secara khusus untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, telah melakukan refocusing dan realokasi anggaran sebanyak 9 kali, dengan total Pendapatan dan Belanja untuk refocusing dan realokasi terakhir masing-masing untuk Pendapatan sebesar Rp 4,8 triliun lebih dan Belanja sebesar Rp 4,7 triliun lebih,” papar Gubernur Sugianto Sabran.

Gubernur Sugianto menjelaskan bahwa refocusing dan realokasi ini dilakukan mengingat prioritas utama pemerintah saat ini adalah penanganan dampak Covid-19, yaitu penanganan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. “Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengerahkan sumber daya dari sisi keuangan untuk mendukung penanganan Covid-19,” katanya.

Gubernur pun menegaskan bahwa dalam rangka mewujudkan Kalteng yang maju, mandiri, dan adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalteng BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah,

dan Harmonis), seluruh jajaran Pemerintah Daerah se-Kalteng berkomitmen menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui penerapan kaidah-kaidah terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan, sehingga pelayanan masyarakat dapat diwujudkan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

“Kami terus berharap koordinasi dan kerjasama Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Tengah untuk memberikan dorongan dan arahan kepada pengelola keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah se-Kalimantan Tengah, sehingga pada akhirnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah kita raih pada tahun 2019 untuk seluruh kabupaten/kota dapat kita pertahankan untuk Laporan Keuangan Tahun 2020,” pungkas Gubernur Kalteng Sugianto Sabran.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalteng Ade Iwan Rusawana menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh pihaknya adalah untuk mengetahui sistem pengendalian dan kepatuhan atas pencatatan dan laporan keuangan daerah, sehingga tim pemeriksa mendapatkan kewajaran informasi dalam laporan keuangan daerah. Dijelaskannya, audit dapat dilakukan melalui prosedur-prosedur alternatif apabila audit dalam situasi normal tidak dapat dilakukan menyusul pandemi Covid-19 saat ini. Ade pun mengapresiasi setiap bentuk kerjasama yang diberikan pihak Inspektorat maupun instansi perangkat daerah lainnya.

Ade berharap kepala daerah dan jajarannya dapat menyediakan data secara cepat, terlebih pada sekitar 14 Mei 2021, akan memasuki cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan dapat menyampaikan informasi data sebelum akhir Maret 2021, sehingga hasil pemeriksaan atas laporan keuangan daerah dapat disampaikan pada akhir Mei 2021. Ditambahkannya, selain laporan keuangan pemerintah provinsi se-Indonesia, mulai tahun ini BPK RI juga akan melakukan pemeriksaan terhadap kinerja.

Sementara itu, tampak hadir mendampingi Gubernur Kalteng dalam entry meeting di Aula Serba Guna Istana Isen Mulang hari ini, antara lain Inspektur Provinsi Kalteng Sapto Nugroho, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalteng Nuryakin, serta Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng Saring. (ran/sop/dmr).



RAPAT KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN KLHS FOOD ESTATE JARING MASUKAN DAN TANGGAPAN

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Fahrizal Fitri, mewakili Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, menghadiri Rapat Konsultasi Publik Tahap Pertama Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Proses Penetapan Kawasan Hutan bagi Ketahanan Pangan di Provinsi Kalteng yang diselenggarakan secara virtual melalui video conference, dari Ruang Rapat Bajakah 2, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (11/2/2021).

Rapat konsultasi publik penyusunan KLHS untuk kegiatan Food Estate ini dibuka oleh Sekretaris Baranahan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI Marrahmat.

Kemenhan RI, dalam upaya mendorong terwujudnya ketahanan pangan, memiliki misi mewujudkan ketahanan pangan yang berdaulat, mandiri, dan ramah lingkungan. Adapun visi Kemenhan RI, dalam hal ini adalah pembangunan budidaya singkong untuk program nasional ketahanan pangan, dengan mengoptimalkan lahan-lahan yang masih bisa diusahakan.

Lahan dalam kawasan hutan, seperti hutan produksi, hutan produksi yang dapat dikonversi, atau hutan produksi terbatas, diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 24 tahun 2020.

Menurut Marrahmat, dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa salah satu syarat dalam proses perizinan dan permohonan pemanfaatan lahan di dalam kawasan hutan adalah menyusun dokumen KLHS. "Dan, inilah yang akan menjadi topik dalam rapat kita hari ini," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, dalam sambutan yang dibacakan Sekda Fahrizal Fitri, menjelaskan bahwa Presiden RI memberikan mandat kepada Kemenhan RI untuk mengembangkan cadangan

pangan nasional di Indonesia karena ketahanan pangan memang memiliki arti penting dalam menjaga dan menjamin pertahanan dan keamanan negara.

"Cadangan makanan menjadi factor effect deterrent bagi pertahanan karena kekuatan cadangan makanan menentukan survival negara dalam menghadapi ancaman peperangan, wabah penyakit, dan bencana alam yang berkepanjangan, serta ancaman embargo negara lain. Jangan pernah berpikir kalau pangan itu hanya beras saja karena masih banyak substitusi lain, misalnya jagung dan singkong," jelas Gubernur sebagaimana disampaikan Sekda.

"Dalam penyusunan dokumen KLHS, kegiatan konsultasi publik pertama ini menjadi penting untuk mengetahui isu-isu strategis dalam perwujudan program ketahanan pangan di bawah Kementerian Pertahanan RI. Saya juga meminta kepada seluruh undangan yang hadir di dalam forum ini untuk bersama-sama memberikan masukan sebagai salah satu upaya mendukung ketahanan pangan bagi Bangsa Indonesia," kata Gubernur.

"Saya harap kita semua dapat ikut berperan positif dalam kegiatan yang diamanatkan oleh Presiden RI melalui program ketahanan pangan Kementerian Pertahanan," pungkas Gubernur Sugianto Sabran.

Selanjutnya, konsultasi publik diisi dengan paparan mengenai program pembangunan Food Estate oleh tenaga ahli penyusun dokumen KLHS. Pada kesempatan berikutnya, peserta rapat diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan, pertanyaan, dan tanggapan.

Rapat ini dihadiri pula oleh Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah Kementerian LHK beserta jajarannya, Kepala Kantor P3E Kalimantan, Kepala BPKH Wilayah IV Palangka Raya, Kepala Perangkat Daerah/Kabupaten/Kota, perwakilan dari LSM Kalteng, serta perwakilan dari institusi pendidikan Universitas Palangka Raya.

Tampak hadir mendampingi Sekda Kalteng di Ruang Rapat Bajakah 2 hari ini, antara lain Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Nurul Edy serta Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalteng Vent Christway. (ran/sop/ben).



SEKDA DUKUNG UPAYA PENATAAN KEMBALI ASET-ASET DAERAH KALTENG

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Fahrizal Fitri membuka Rapat Koordinasi terkait penertiban aset yang akan diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Kalteng, bertempat di Aula Eka Hapakat, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (5/2/2021).

Dalam arahnya saat membuka kegiatan, Sekda Fahrizal Fitri mengatakan bahwa masalah aset ini adalah masalah yang terus menjadi catatan dalam rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. “Memang saya pahami masalah aset ini merupakan kesalahan turun-temurun dan ini tidak hanya terjadi di Pemprov. Tapi, alangkah baiknya saat ini adalah bagaimana kita melakukan penataan lebih baik lagi. Selama aset ini tercatat, akan diketahui barangnya dimana,” kata Sekda.

Menurut Sekda, yang menjadi permasalahan saat ini adalah aset-aset bergerak, di mana sebagian dari aset-aset tersebut belum dikembalikan kepada negara oleh pejabat yang telah memasuki masa pensiun atau dipindahtugaskan. “Padahal aset-aset ini adalah pendukung jabatan pada saat itu dan itu adalah milik negara. Setelah pensiun atau pindah, itu seharusnya tidak dibawa dan seolah itu menjadi milik dia. Dan, ini mohon maaf sudah menjadi kebiasaan,” jelas Sekda.

Sekda menambahkan bahwa dalam MoU atas penggunaan aset daerah perlu dicantumkan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta dicantumkan nilai aset tersebut. “Kalau yang bersangkutan akan mengganti, silakan, dengan nilai aset pengadaan itu. Nilai pengadaannya untuk kendaraan. Kalau tanah jangan karena itu berbeda. Dan, disampaikan juga kalau mereka merasa ingin memiliki aset-aset milik pemerintah yang mungkin nanti akan dilelang, silakan ikuti lelang,” imbuh Sekda.

Berkaitan dengan Rumah Negara, Sekda menegaskan bahwa Rumah Negara semestinya digunakan untuk pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, saat ini masih ditemui adanya pengalihan hak aset oleh pihak-pihak yang tidak berstatus PNS. “Upaya-upaya kita pengawalan dengan Satpol PP, saya rasa juga bagian dari upaya intervensi kita untuk mereka mau mengembalikan. Terus, sampaikan di dalam itu bahwa kalau tidak dikembalikan, maka konsekuensinya akan kami serahkan ke Kejaksaan Tinggi dan KPK,” papar Sekda.

Ditambahkannya, Kejaksaan Tinggi saat ini telah mengalihkan sebagian permasalahan aset ini dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) kepada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), di mana apabila sudah ditangani oleh Jampidsus, maka ada unsur pidana di dalamnya, seperti unsur penggelapan atau penguasaan aset negara. “Saya harap ada aset tertentu yang masuk Pidsus, sehingga semuanya memberi penyadaran. Permasalahan-permasalahan lama harus kita bersihkan. Ke depan, jangan sampai

kita membuat permasalahan baru. Saya berharap kita dapat melakukan monitoring, melakukan upaya-upaya penertiban supaya semakin baik pencatatan ataupun laporan keuangan kita dalam pengelolaan aset,” pungkas Sekda Fahrizal Fitri.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalteng Nuryakin melaporkan bahwa dalam pelaksanaan penertiban barang milik daerah, sudah dikukuhkan MoU antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dengan Kejaksaan Tinggi Kalteng dan KORSUPGAG (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan) KPK RI, sehingga dalam pelaksanaannya memberikan hak yang akan memudahkan pihaknya dalam penertiban ini. “Hal ini sesuai dengan petunjuk langsung dari Pak Gubernur beberapa waktu yang lewat bahwa di luar 2021, paling lambat pertengahan tahun 2022, aset ini sudah tertata. Ini yang menjadi pendorong kita bahwa komitmen dari pimpinan cukup kuat untuk kita melaksanakan penertiban,” jelasnya.

Diungkapkan Nuryakin, penertiban aset daerah tahap pertama akan menyasar kendaraan roda 2 dan roda 4. “SKK (Surat Kuasa Khusus) yang sudah disampaikan kepada kami akan ditinjau ulang, mana yang memang domainnya Kejaksaan Tinggi dan KPK, mana yang domainnya hanya kita Pemprov atau anti mainstream-nya kita lakukan upaya hukum lainnya. Setelah penertiban aset bergerak, akan dilanjutkan dengan penertiban Rumah Negara, baik untuk Golongan 1, Golongan 2, maupun Golongan 3. Ada hal yang perlu kita selesaikan di regulasinya. Setelah itu, baru kita akan selesaikan berkenaan dengan penertiban Rumah Negara ini,” tutup Nuryakin.

Tampak hadir pula dalam Rapat Koordinasi kali ini, antara lain Inspektur Provinsi Kalteng Sapto Nugroho serta sejumlah Kepala Dinas/Badan, Kepala Biro, dan Sekretaris Dinas/Badan atau yang mewakili. (ran/sop/boy).



INDONESIA UPAYAKAN RISET VAKSIN MERAH PUTIH BERBASIS VIRUS COVID-19 YANG BEREDAR DI INDONESIA

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Tim Komunikasi Publik Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kalimantan Tengah (Kalteng) menyampaikan Press Release Kamis (11/02/2021) mengenai perkembangan penanganan pandemi Covid-19 di Kalteng hingga pukul 15.00 WIB.

Tim Satgas Covid-19 Kalteng melalui Satgas Covid-19 mengatakan Indonesia tidak hanya menunggu impor bahan baku maupun vaksin jadi dari luar negeri. Indonesia juga berupaya melakukan riset Vaksin Merah Putih yang juga mengalami kemajuan. Lembaga penelitian dan universitas yang turut melakukan penelitian telah menunjukkan kemajuan dalam penemuan kandidat Vaksin Merah Putih dalam waktu dekat.

Prof. Dr. Ali Ghufroon Mukti, M.Sc., Ph.D., Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 Kementerian Riset dan Teknologi menyampaikan Vaksin Merah Putih adalah vaksin yang dikembangkan berbasis virus Covid-19 yang beredar di Indonesia. Ada beberapa pusat penelitian, seperti di Lembaga Eijkman, ITB, UI, Unair, dan sebagainya. Perkembangannya sampai saat ini sesuai target. Diperkirakan bulan Maret 2021 atau paling lambat bulan April 2021, kandidat vaksin akan diserahkan ke PT Bio Farma untuk diuji pada tahap selanjutnya.

Proses selanjutnya yang dimaksud merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menguji keamanan dan khasiat vaksin. Dilakukan uji pra klinik dengan hewan percobaan serta uji klinik I, II, dan III. Semua uji klinik itu harus ditempuh. Setelah itu, diurus untuk mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM).

Bambang Heriyanto, Juru Bicara Vaksinasi Bio Farma, juga menyampaikan kesiapan PT Bio Farma dalam melakukan proses selanjutnya. Jadi, selain kompetensi memproduksi vaksin berbasis inactivated

virus, juga kompetensi di produksi vaksin berbasis recombinant. Terkait Vaksin Merah Putih, saat ini Bio Farma sudah bisa memproduksi sendiri vaksin hepatitis B berbasis recombinant yang tentu tidak jauh juga teknologi dan fasilitasnya dengan vaksin Covid-19 berbasis recombinant.

"Perlu diingat bahwa vaksin bukan satu-satunya cara untuk terbebas dari pandemi Covid-19. Untuk itu, Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kalteng mengingatkan agar kita juga harus tetap melaksanakan 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan) serta 3T (testing, tracing, dan treatment). Ini semua harus komprehensif. Tentu dengan vaksin, kita berharap terbentuknya kekebalan kelompok sebagai upaya mencegah

tertular Covid-19," papar Tim Satgas.

Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kalteng menyampaikan bahwa PT Bio Farma (Persero) segera memproses 13 juta dosis vaksin Covid-19 dari bahan baku yang telah diterima Indonesia dari Sinovac. Kedatangan bahan baku vaksin ini guna mengamankan ketersediaan vaksin bagi 181 juta rakyat Indonesia untuk membentuk 70 persen herd immunity.

Seperti diketahui, sebanyak 10 juta vaksin Covid-19 dalam bentuk bahan baku telah datang lagi ke Indonesia, Selasa (2/2). Kedatangan 10 juta bahan baku vaksin ini adalah tahap keempat, melengkapi tiga tahap sebelumnya, yakni pada Desember 2021 mendatangkan 1,2 juta vaksin dari Sinovac. Disusul pada bulan yang sama sebanyak 1,8 juta dosis vaksin siap pakai dan pada Januari 2021 sebanyak 15 juta vaksin dalam bentuk bahan baku.

Juru Bicara Vaksinasi Bio Farma Bambang Heriyanto mengatakan pihaknya telah memproduksi bahan baku vaksin Sinovac tahap ketiga tersebut sejak 14 Januari 2021. Kemajuan proses produksi ini menjadi penambah optimisme bagi program vaksinasi yang terus berjalan hingga kini. Harapannya, 13 batch bisa selesai secepatnya. Satu batch berisi 950 ribu dosis, jadi sekitar 13 juta dosis yang sudah disiapkan dalam waktu dekat ini.

Nantinya, 13 batch ini akan kembali diuji mutu oleh Bio Farma dan Badan POM terlebih dahulu agar memenuhi syarat. Kemudian, bahan baku Vaksin Sinovac yang datang pada tahap keempat sebanyak 10 juta tentu diproduksi setelah bahan baku 15 juta selesai diproduksi.

Untuk pendistribusian seluruh vaksin Covid-19, Bio Farma telah menyiapkan sistem pelacakan (track and trace system). Dengan adanya sistem pelacakan ini, kualitas vaksin terjamin mutunya sampai ke penerimanya.



Bio Farma menyediakan satu sistem seperti barcode baik di vial maupun dusnya, sehingga dapat melacak keberadaan vaksin maupun mutunya secara digital.

Terkait Vaksin Merah Putih, Bio Farma tentu mengharapkan kemandirian memproduksi Vaksin Merah Putih. Mudah-mudahan Bio Farma dengan kemampuannya saat ini bisa mensinergikan lembaga riset dan perguruan tinggi, sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri tapi juga ekspor ke luar negeri

Selanjutnya, disampaikan perkembangan data Covid-19 yang dihimpun akumulasinya pada 11 Februari 2021 pukul 15.00 WIB, sebagai berikut:

- 1) Kabupaten/kota zona terdampak, sebanyak 13 kabupaten dan 1 kota sudah terdampak.
- 2) Kasus Konfirmasi, ada penambahan sebanyak 31 orang, yaitu di Palangka Raya 21 orang, Kotawaringin Barat 7 orang, Kapuas 2 orang, dan Murung Raya 1 orang, sehingga dari semula sebanyak 12.514 orang menjadi 12.545 orang.

- 3) Sembuh, ada penambahan sebanyak 59 orang, yaitu di Palangka Raya 28 orang, Katingan 6 orang, Kotawaringin Timur 3 orang, Kotawaringin Barat 6 orang, Pulang Pisau 1 orang, Kapuas 7 orang, Barito selatan 2 orang, dan Murung Raya 6 orang, sehingga dari semula 11.135 orang menjadi 11.194 orang.
- 4) Kasus Suspek, tidak ada penambahan, sehingga tetap 162 orang.
- 5) Kasus Probable, tidak ada penambahan, sehingga tetap 64 orang.
- 6) Dalam Perawatan, ada penurunan sebanyak 30 orang, sehingga dari semula 1.048 orang menjadi 1.018 orang.
- 7) Kasus Meninggal, ada penambahan sebanyak 2 orang, yaitu di Palangka Raya 1 orang dan Murung Raya 1 orang, sehingga dari semula 331 orang menjadi 333 orang. Tingkat kematian (CFR) 2,7%.
- 8) Jumlah spesimen ada penambahan sebanyak 359 orang, sehingga dari semula 101.874 spesimen menjadi sebanyak 102.233 spesimen. (dew).

SATGAS PENANGANAN COVID-19: PERSENTASE TINGKAT KESEMBUHAN COVID-19 KALTENG MENCAPAI 90% LEBIH

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Tim Komunikasi Publik Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali menyampaikan Press Release mengenai perkembangan penanganan pandemi Covid-19 sampai dengan hari Jumat (19/02/2021) pukul 15.00 WIB.

Dalam keterangan rilisnya kali ini, Satgas Penanganan Covid-19 mengungkapkan bahwa pada saat ini persentase tingkat kesembuhan Covid-19 Kalteng telah mencapai 90% lebih, berdasarkan data yang dilansir oleh Media Center Satgas Penanganan Covid-19 Kalteng. Diharapkan kondisi ini semakin membaik dan pandemi Covid-19 cepat berlalu. Untuk itu, selalu diingatkan kembali kepada semua pihak terkait dan masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 4M dalam keseharian, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

Selain itu, Satgas Penanganan Covid-19 juga menyampaikan informasi bahwa pada tanggal 9 Februari 2021, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.

Adapun ketentuan mengenai berbagai sanksi bagi penolak vaksin, tercantum pada Pasal 13A dalam Perpres tersebut. Disebutkan, setiap orang yang ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan wajib mengikuti vaksinasi Covid-19. Dikecualikan dari kewajiban tersebut, yakni bagi sasaran penerima vaksin yang tidak memenuhi kriteria sesuai indikasi vaksin Covid-19 yang tersedia.

Bagi mereka yang ditetapkan sebagai penerima

vaksin Covid-19 tetapi tidak mengikuti vaksinasi bisa mendapatkan sanksi berupa:

1. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
2. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
3. Denda pengenaan sanksi administratif tersebut dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai kewenangannya.

Selanjutnya, disampaikan perkembangan data Covid-19 Kalteng pada hari ini, di mana terdapat penambahan Kasus Konfirmasi sebanyak 99 orang, yaitu di Palangka Raya 25 orang, Katingan 2 orang, Kotawaringin Timur 7 orang, Kotawaringin Barat 10 orang, Lamandau 2 orang, Sukamara 1 orang, Pulang Pisau 1 orang, Kapuas 4 orang, Gunung Mas 1 orang, Barito Selatan 1 orang, Barito Timur 37 orang, dan Murung Raya 8 orang, sehingga dari semula sebanyak 12.969 orang menjadi 13.068 orang. Pasien Sembuh ada penambahan sebanyak 77 orang, yaitu di Palangka Raya 7 orang, Kotawaringin Timur 10 orang, Kotawaringin Barat 12 orang, Sukamara 6 orang, Kapuas 5 orang, Barito Timur 26 orang, Barito Utara 3 orang, dan Murung Raya 8 orang, total menjadi 11.757 orang.

Kasus Suspek ada penurunan sebanyak 9 orang, sehingga dari semula 182 orang menjadi 173 orang. Kasus Probable tidak ada penambahan, tetap 68 orang. Pasien Dalam Perawatan ada penambahan sebanyak 21 orang, menjadi 966 orang. Kasus Meninggal ada penambahan sebanyak 1 orang, yaitu di Katingan, total menjadi 345 orang, dengan tingkat kematian (CFR) 2,6%. (win).

SATGAS COVID-19 KALTENG BERHARAP BUPATI/WALI KOTA DORONG TERCAPAINYA TARGET VAKSINASI

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kalimantan Tengah menyampaikan press release perkembangan penanganan pandemi Covid-19 pada Kamis (18/2/2021). Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kalimantan Tengah menyampaikan, berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 144/09/Dinkes perihal Percepatan dan Pelaksanaan Program Vaksinasi Covid-19, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 sebagai bencana non-alam berupa wabah/pandemi.

Untuk meningkatkan kekebalan masyarakat melalui pemberian vaksin, pelaksanaan vaksinasi tahap pertama untuk tenaga kesehatan di Kalimantan Tengah telah dilaksanakan sejak tanggal 14 Januari 2021 dan berlangsung hingga saat ini, dengan total sasaran 19.927 orang, namun sampai saat ini belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pemerintah selanjutnya akan memberikan vaksinasi tahap kedua pada kelompok petugas publik dan Lansia, sehingga perlu ditetapkan jumlah sasaran di Provinsi Kalimantan Tengah untuk alokasi jumlah dosis vaksin dari Pemerintah Pusat.

Sehubungan dengan hal di atas, sangat diharapkan kerjasama seluruh Bupati/Wali Kota untuk memastikan tercapainya target program vaksinasi Covid-19 di Kalimantan Tengah dengan mendorong hal-hal berikut:

1. Mempercepat pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 kepada sumber daya manusia kesehatan dengan target 19.927 sumber daya manusia kesehatan yang sudah menerima vaksin dosis kedua sebelum 18 Februari 2021.
2. Vaksinasi Covid-19 pada tenaga kesehatan yang berusia ≥ 60 tahun dapat segera dimulai jika tersedia dosis vaksin.
3. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pada tahap kedua dengan target sasaran petugas publik dan Lansia akan segera dilaksanakan pada pekan keempat bulan Februari 2021 dengan estimasi jumlah sasaran untuk Kalimantan Tengah sebanyak 386.825 orang.
4. Melakukan pendataan sasaran bagi pejabat Negara dan Daerah, petugas pelayanan publik, dan Lansia yang terdiri dari Tenaga Pendidik (Guru dan Dosen), Pedagang Pasar, Pegawai Pemerintah (ASN Pusat, ASN Daerah, dan Honorer), Aparat Keamanan dan Hukum (TNI, Polri, dan Satpol PP), Kejaksaaan, Petugas Pelayanan Publik lainnya (Damkar, BPBD, BUMN, BUMD, dan BPJS), pekerja Transportasi Publik dan Pariwisata, Tokoh Agama, Wakil Rakyat (DPD dan DPRD), serta Wartawan dan Pekerja Media.
5. Memantau dan menanggulangi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dengan membentuk Tim Pokja

KIPI di daerah dan membentuk Tim Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.

Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kalimantan Tengah mengatakan, "Kita sangat bersyukur bahwa pada saat ini Persentase tingkat kesembuhan Covid-19 Kalimantan Tengah telah mencapai 90% lebih berdasarkan data yang dilansir oleh Media Center Satgas Penanganan Covid-19 Kalteng. Semoga kondisi ini semakin membaik dan pandemi Covid-19 cepat berlalu."

Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kalimantan Tengah menyampaikan jumlah akumulasi data sampai dengan hari ini, Kamis (18/2/2021), di mana pasien konfirmasi positif Covid-19 di Kalimantan Tengah bertambah sebanyak 86 orang dengan total kasus mencapai 12.969 orang. Penambahan pasien dinyatakan sembuh sebanyak 54 orang dengan total kasus mencapai 11.680 orang. Dan, total pasien dinyatakan meninggal dunia bertambah sebanyak 4 orang dengan total 345 orang, dengan tingkat kematian atau Case Fatality Rate (CFR) 2,7%.

Dalam press release tersebut, kembali disampaikan perkembangan data Covid-19, di mana sebanyak 13 kabupaten dan 1 kota sudah terdampak. Kasus Konfirmasi ada penambahan sebanyak 86 orang, yaitu di Palangka Raya 33 orang, Katingan 2 orang, Kotawaringin Timur 7 orang, Kotawaringin Barat 20 orang, Seruyan 1 orang, Pulang Pisau 1 orang, Kapuas 2 orang, Gunung Mas 15 orang, dan Murung Raya 5 orang, sehingga dari semula sebanyak 12883 orang menjadi 12969 orang. Sembuh ada penambahan sebanyak 54 orang, yaitu di Palangka Raya 24 orang, Katingan 2 orang, Kotawaringin Timur 9 orang, Kotawaringin Barat 2 orang, Pulang Pisau 2 orang, Kapuas 4 orang, Gunung Mas 5 orang, Barito Selatan 1 orang, dan Barito Utara 5 orang, sehingga dari semula 11626 orang menjadi 11680 orang. Kasus Suspek ada penurunan sebanyak 51 orang, sehingga dari semula 233 orang menjadi 182 orang. Kasus Probable tidak ada penambahan, sehingga tetap 68 orang. Dalam Perawatan ada penambahan sebanyak 28 orang, sehingga dari semula 916 orang menjadi 944 orang.

Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kalimantan Tengah mengingatkan kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah agar tetap mematuhi protokol kesehatan serta memutus mata rantai sebaran Covid-19. Bagi warga yang belum sadar terhadap protokol kesehatan, diingatkan untuk mematuhi Wajib 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan agar Covid-19 ini segera berakhir di Kalimantan Tengah dan seluruhnya. (rik).

GUBERNUR KALTENG HADIRI PELETAKAN BATU PERTAMA PEMBANGUNAN RS NU PROVINSI KALTENG

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran menghadiri acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rumah Sakit Nahdhatul Ulama (RS NU) Provinsi Kalteng di Jl. G. Obos, Palangka Raya, Sabtu (06/02/2021).

Dalam sambutannya, Gubernur Kalteng menyampaikan bahwa kehadiran RS NU di Kalteng menjadi salah satu Fasilitas Kesehatan yang sangat strategis dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“Menjadi harapan kita bersama dengan adanya Pembangunan Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Provinsi Kalimantan Tengah ini dapat memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi umat dan masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah serta berkontribusi dalam membangun Kalimantan Tengah yang semakin BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Amanah, dan Harmonis),” tutur Gubernur Sugianto Sabran.

Gubernur Sugianto Sabran juga mengatakan RS NU merupakan RS Umum Kelas “D” yang nantinya akan dibangun 4 lantai dengan mengambil konsep RS Modern, sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang maksimal serta memberikan kenyamanan kepada masyarakat atau pasien yang datang berobat ke RS ini

Gubernur Sugianto Sabran menjelaskan konsep bangunan RS ini nantinya mengambil bentuk 2 Hexagonal, di mana Hexagonal yang pertama berbentuk seperti sarang lebah. Bentuk ini terinspirasi dari salah satu ayat di Kitab suci Al-Qur’an, QS An-Nahl ayat 69, yang menyebutkan tentang madu dan pengobatan. Sedangkan Hexagonal Layer yang kedua, menggambarkan bentuk struktur DNA yang melambangkan sisi modernitas dari



Rumah Sakit ini.

Lebih lanjut Gubernur mengutarakan bahwa Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Kalteng sebelumnya telah membangun Klinik Pratama NU Palangka Raya yang mulai beroperasi pada tanggal 13 Agustus tahun 2020 lalu dan telah melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, tetap menaati Protokol Kesehatan, serta melakukan 4M, yakni menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau handsanitizer, serta menjauhi kerumunan.

Sementara itu, Ketua PWNU Provinsi Kalteng H.M. Wahyudi F. Dirun dalam laporannya menyampaikan rencana terkait pembangunan RS NU Provinsi Kalteng. Wahyudi mengatakan bahwa RS NU Provinsi Kalteng yang akan dibangun ini, sebelumnya adalah klinik.

Diutarakan oleh Wahyudi bahwa sebelum dinaikkan statusnya menjadi RS, klinik tersebut sudah memiliki 3 dokter umum dan 1 dokter gigi. Hal ini juga mendapat respon positif dari masyarakat Kalteng.

Wahyudi juga mengatakan bahwa sejak Bulan Februari 2021 ini, pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan pihak BPJS dan juga sudah bisa melakukan swab antigen.

Peletakan Batu Pertama Pembangunan RS NU Provinsi Kalteng dilakukan pertama kali oleh Kepala Kepolisian Daerah Kalteng Irjen Pol Dedi Prasetyo, dilanjutkan oleh Anggota DPR RI Dapil Kalteng H. Agustiar Sabran, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud, dan Ketua PWNU Provinsi Kalteng H.M. Wahyudi F. Dirun. (may/nov/bow).



MEWAKILI GUBERNUR, SEKDA FAHRIZAL FITRI BUKA RAKORDA LPTQ SE-KALTENG TAHUN 2021

PALANGKARAYA–BIROADPIM. Sekretaris Daerah (Sekda) Fahrizal Fitri, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Se-Kalteng Tahun 2021 di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, Kamis (25/2/2021).

Dalam sambutan yang dibacakan Sekda Fahrizal Fitri, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengungkapkan bahwa kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) serta Seleksi Tilawah Quran dan Hadits (STQH) tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.

“Oleh karena itu, mari kita bersama-sama tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya,” imbau Gubernur sebagaimana disampaikan Sekda Fahrizal Fitri yang menambahkan bahwa saat ini pemerintah tengah melaksanakan vaksinasi untuk menekan penyebaran Covid-19, sehingga masyarakat diharapkan mendukung pelaksanaan program tersebut.

Gubernur pun menyambut baik dan mengapresiasi diselenggarakannya Rakorda hari ini yang dapat menjadi media untuk bersilatullahi serta media untuk melakukan pembenahan, penguatan, penataan, bersinergi, dan bekerjasama, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, terutama untuk komitmen pembinaan yang lebih intensif dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 188.44/579/2019 tanggal 18 Desember 2019, Kota Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan MTQ XXXI Tingkat Provinsi Kalteng Tahun 2021 dan Kota Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan MTQ XXXII Tingkat Provinsi Kalteng Tahun 2023. Namun, menyusul Surat Bupati Kotawaringin Barat mengenai penundaan pelaksanaan MTQ di Kota Pangkalan Bun dengan alasan pemulihan perekonomian dan masyarakat pasca masa pandemi Covid-19, maka Gubernur berharap Rakorda hari ini juga membahas tuan rumah MTQ November 2021 mendatang.

“Saya berharap, melalui Rakorda LPTQ ini, selain membahas berkenaan dengan program kerja maupun LPTQ, juga nantinya membahas tentang tuan rumah penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan bulan November 2021,” kata Gubernur melalui Sekda Kalteng Fahrizal Fitri yang mempersilakan Kabupaten lainnya untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Gubernur juga berharap potensi dan strategi pengembangan maupun penguatan program kerja LPTQ

Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalteng dapat digali lagi dalam upaya peningkatan sumber daya peserta yang lebih handal dan berkompeten untuk semua cabang atau golongan yang dilombakan guna meraih prestasi yang lebih baik, terutama dalam menghadapi penyelenggaraan MTQ atau STQH Provinsi Kalteng dan STQH Nasional Tahun 2021.

“Diharapkan, LPTQ Provinsi Kalimantan Tengah untuk selalu berkoordinasi dengan LPTQ Nasional, sehingga terjadi sinkronisasi atau sinergitas kebijakan Nasional tentang pengembangan LPTQ serta peningkatan pelaksanaan MTQ atau STQH di daerah,” imbuh Gubernur.

Pada kesempatan kali ini pula, Gubernur menyampaikan bahwa pasca ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi RI dan KPU Provinsi Kalteng terkait hasil Pemilu pada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng serta Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur, seluruh peserta yang hadir saat ini diimbau untuk tetap menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan, serta persaudaraan agar kehidupan bermasyarakat di Kalteng senantiasa harmonis dan damai dalam rangka bersama-sama mewujudkan Kalteng yang semakin BERKAH.

Adapun terkait pandemi Covid-19 yang belum berakhir, Gubernur kembali mengimbau seluruh peserta dan masyarakat Kalteng agar senantiasa menjaga kesehatan dan berupaya meningkatkan kekebalan atau imunitas tubuh dengan berolahraga, mengatur pola makan, membiasakan mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak seraya memohon perlindungan dan keselamatan kepada Allah SWT.

Sementara itu, dalam penyelenggaraan MTQ atau STQH bidang perhakiman, Gubernur mengharapkan hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan MTQ tingkat Provinsi dan Nasional serta diupayakan pengkaderan maupun pendalaman kompetensi Dewan Hakim.

“Sehingga perlu diadakan semacam orientasi atau pelatihan sebelum MTQ atau STQH dilaksanakan karena Dewan Hakim harus berkompeten dan memiliki integritas serta menguasai bidang keahliannya masing-masing,” jelas Gubernur.

Menutup sambutannya, Gubernur Sugianto Sabran berharap seluruh peserta Rakorda LPTQ Tahun 2021 ini dapat memberikan saran atau pemikiran yang positif dan konstruktif, sehingga dapat merumuskan berbagai kesepakatan yang lebih baik dan maslahat untuk kesuksesan agenda atau program kerja LPTQ dan penyelenggaraan MTQ atau STQH pada tahun-tahun mendatang di Provinsi Kalteng.

Rakor LPTQ yang mengambil tema “Penguatan Pembinaan yang Lebih Intensif dan Berkelanjutan untuk Meningkatkan Prestasi Kafilah Menuju Terwujudnya

Kalteng Semakin BERKAH” ini, antara lain juga dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Kalteng H. Abd. Rasyid dan Ketua LPTQ Kalteng H. Nuryakin.

Ketua LPTQ Kalteng Nuryakin mengungkapkan bahwa, meskipun MTQ XXX Tingkat Provinsi Kalteng di Barito Selatan tahun 2020 ditiadakan, namun pihaknya tetap mempersiapkan Kafilah untuk mengikuti MTQ XXVIII Tingkat Nasional di Padang Sumatera Barat. Pada ajang kompetisi tersebut, Kalteng meraih prestasi Terbaik III Cabang Tilawah Golongan Remaja Putera atas nama Wahyu Andi Saputra dari Kabupaten Kotawaringin Barat.

Nuryakin dan jajarannya pun menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas bantuan dan

dukungan, terutama dari Gubernur Kalteng, terhadap upaya peningkatan dan pengembangan kinerja LPTQ Provinsi Kalteng.

Selanjutnya, Nuryakin menjelaskan, pada 7 September 2020, gedung lama Sekretariat LPTQ Provinsi Kalteng mengalami musibah kebakaran akibat adanya arus pendek listrik. Adapun gedung Sekretariat LPTQ yang baru, saat ini masih dalam proses pengerjaan.

“Kita berharap pembangunan gedung Sekretariat LPTQ tersebut dapat segera diselesaikan, sehingga dapat difungsikan untuk lebih menunjang kelancaran program kerja LPTQ Provinsi Kalimantan Tengah,” harap Nuryakin yang menambahkan bahwa gedung tersebut nantinya juga akan difungsikan untuk pusat pelatihan dan pembinaan generasi Qurani di Kalteng. (ran/sop/dmr).

GUBERNUR SUGIANTO SABRAN BUKA KONFERWIL BERSAMA PWN, GP ANSOR, DAN FATAYAT NU KALTENG

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran membuka secara resmi Konferensi Wilayah (Konferwil) Bersama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWN), Gerakan Pemuda (GP) Ansor, dan Fatayat NU Kalteng Tahun 2021, bertempat di Aula Jayang Tingang, Kompleks Kantor Gubernur, Palangka Raya pada Sabtu (6/2/2021) siang.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, (seraya) memohon ridho-Nya, acara Konferwil (PWN, GP Ansor, dan Fatayat NU Kalteng) XII saya nyatakan dibuka,” ungkap Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dalam sambutannya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Sugianto Sabran menyampaikan apresiasi dan berharap PWN Kalteng dapat terus mendukung dan berperan serta dalam menyukseskan berbagai program pembangunan di Kalteng, termasuk Program Strategis Nasional, yaitu Food Estate dan Cadangan Logistik Strategis.

“Pemerintah menyetujui bahwa Kalteng sebagai Lumbung Pangan Nasional (Food Estate). Di bawah Kementerian Pertahanan, Kalteng juga bagian Cadangan Logistik Strategis, ada singkong nantinya yang sekarang sedang digarap,” jelas Gubernur Sugianto Sabran.

“Harapan saya pemuda-pemudi NU (turut) ambil bagian, ikut serta di dalamnya. Kan ini (program Food Estate dan perkebunan singkong) butuh orang banyak. NU coba mengambil bagian, memberikan masukan dan saran kepada pemerintah, kepada kami,” imbuah Gubernur Kalteng.

Lebih lanjut, Gubernur Sugianto juga mengajak kepada seluruh anggota NU Kalteng untuk turut

berpartisipasi aktif dalam penanggulangan pandemi Covid-19, baik melalui upaya sosialisasi maupun kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan. “Covid itu wajib dikendalikan bersama-sama dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat,” pungkask Gubernur Sugianto Sabran dengan tegas.

Kegiatan Konferwil ini diikuti oleh para Pengurus Wilayah (PW) dan Pengurus Cabang (PC) NU, GP Ansor, dan Fatayat NU se-Kalteng dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan (Prokes). “Dalam ruangan ini tidak bisa masuk semuanya karena kita wajib menaati Prokes yang sudah ditetapkan. Semua peserta juga sudah melakukan tes SWAB-PCR,” terang Ketua Panitia Pelaksana Konferwil Suhardi.

Konferwil Bersama PWN, GP Ansor, dan Fatayat NU Kalteng Tahun 2021 ini mengusung tema “Menyebarkan Aswaja dan Meneguhkan Komitmen Kebangsaan” dengan sub tema “Konsolidasi Organisasi, Memperkokoh Persatuan untuk Mewujudkan KALTENG BERKAH”. Kegiatan ini dirangkai pula dengan tausiyah dari Ketua Pengurus Besar (PB) NU K.H. Marsudi Suhud yang hadir mewakili Ketua Umum PBNU K.H. Said Aqil Siradj. Selain itu, ada pula pemutaran video mengenai sejarah lahirnya NU.

Turut hadir dalam acara pembukaan Konferwil ini, di antaranya Anggota DPR RI Dapil Kalteng H. Agustiar Sabran, Anggota DPR RI yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU Anggia Ermarini, Kapolda Kalteng Irjen Pol Dedi Prasetyo, Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Fahrizal Fitri, Ketua Tanfidziyah PWN Kalteng Wahyudie F. Dirun, serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng. (set/eka).

MENTERI PERTANIAN BERSAMA GUBERNUR KALTENG TINJAU PETERNAKAN SAPI DI KABUPATEN SUKAMARA



PANTAI LUNCI – BIRO ADPIM. Setelah meninjau panen perdana padi di Kawasan Food Estate Kabupaten Pulang Pisau, Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI) Syahrul Yasin Limpo didampingi Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran melanjutkan kunjungan kerjanya menuju Kabupaten Sukamara.

Tiba sekitar pukul 16.25 WIB di Sukamara dengan menggunakan helikopter, Mentan Syahrul Yasin Limpo bersama Gubernur Sugianto Sabran kemudian meninjau langsung pengembangan peternakan sapi yang dikelola PT Sukamara Ranch di wilayah Kecamatan Pantai Lunci pada Rabu (10/2/2021) sore.

Tampak pula mendampingi Menteri Pertanian dalam peninjauan peternakan sapi tersebut, antara lain Bupati Sukamara Windu Subagio beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sukamara dan juga Manager PT Sukamara Ranch Dwi Hartanto.

Dalam keterangan persnya usai peninjauan, Mentan Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan bahwa pengembangan peternakan sapi di Kabupaten Sukamara ini memiliki prospek yang sangat bagus, apalagi kebutuhan daging sapi secara nasional juga masih perlu dipenuhi. Upaya-upaya percepatan perlu dilakukan ke depan untuk mendukung pengembangan sapi tersebut.

“Saya kira ini sebuah potensi yang sangat prospektif untuk bisa dikembangkan. Dan, saya dengan Pak Gubernur tadi sudah bicara panjang bersama Pak Bupati untuk mencoba membuat hitungan-hitungan yang lebih konkret untuk bisa diakselerasi lebih cepat. Biar bagaimana

secara nasional kita butuh protein dari hewani. Hal ini menjadi penting,” ungkap Menteri Syahrul Yasin Limpo.

Sementara itu, Gubernur Sugianto Sabran menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kunjungan Mentan Syahrul Yasin Limpo dalam rangka melihat langsung progres pengembangan program ketahanan pangan nasional di Kalteng. Gubernur Sugianto pun mengajak seluruh elemen masyarakat Kalteng untuk mendukung dan menyambut Program Strategis Nasional tersebut dengan penuh semangat, kebersamaan, dan rasa optimis demi kemajuan Kalteng.

“Ini sangat luar biasa. Jadi, kita dengan Pak Mentan, atas arahan Pak Presiden, kita kunjungan tadi ke Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau. Pak Mentan dari Kalsel tadi mampir sebentar beri bantuan, terus ke Bataguh, terus ke Pulang Pisau dulu, terus ke Kabupaten Sukamara melihat sapi ini. Ya, mudah-mudahan Kalteng, mari bekerja keras, sambut dengan semangat, kebersamaan, dan persatuan untuk membangun Kalteng,” ungkap Gubernur Sugianto Sabran.

Selesai peninjauan peternakan sapi di Kabupaten Sukamara tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo didampingi Gubernur Sugianto Sabran kemudian menuju Bandara Iskandar Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat. Berangkat dari Bandara ini, Menteri Pertanian dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). (set/dmr).

GUBERNUR SUGIANTO SABRAN LAKUKAN KUNJUNGAN KERJA KE KABUPATEN SUKAMARA

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Sukamara, didampingi Istri yang juga merupakan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Kalteng Ivo Sugianto Sabran pada Selasa (23/2/2021). Kunjungan kerja Gubernur Kalteng bersama Ketua TP-PKK Provinsi kali ini dalam rangka tindak lanjut kunjungan kerja Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo beberapa waktu lalu ke Kalteng untuk melihat prospek pembangunan yang dapat dikembangkan, di antaranya di Kabupaten Sukamara.

“Kami sudah menjadwalkan Kunker ke daerah barat, kita ingin melihat, mempercepat infrastruktur. Terus, melihat perkembangan ekonomi di bidang peternakan sapi. Insya Allah, Bismillah, Insya Allah, kemarin ketika Pak Mentan kunjungan ke Kabupaten Sukamara, bahwa ada rencana kita akan ekspor sapi ke Jakarta. Permintaan 10 ribu ekor. Makanya, hari ini saya membawa Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan. Nah, ini perlu disyukuri bahwa inilah yang selama ini yang kita kerjakan,” ungkap Gubernur Kalteng Sugianto Sabran usai tiba di Bandara Iskandar Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, sehari sebelum kunjungan kerjanya ke Sukamara, Senin (22/2/2021).

Dalam kunjungan kerja Gubernur Sugianto Sabran ke Kabupaten Sukamara, Selasa (23/2/2021), hadir pula Anggota DPR RI Dapil Kalteng H. Agustiar Sabran. Gubernur juga didampingi oleh sejumlah Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, di antaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Shalahuddin, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ermal Subhan, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Hj. Sunarti, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sri Widanarni, Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalteng Lisda Arriyana, Plt. Kepala Dinas Sosial Rian Tangkudung, serta Plt. Kepala Dinas Pendidikan Ahmad Syaifudi.

Setibanya di Sukamara Ranch, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran beserta rombongan disambut Bupati Windu Subagio, Wakil Bupati H. Ahmadi, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sukamara. Agenda kemudian dilanjutkan dengan acara pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Sukamara serta para Kader PKK dan Pokja PAUD Kabupaten Sukamara, bertempat di Gasebo Sukamara Ranch. Dalam kesempatan itu, Gubernur Sugianto Sabran menyampaikan tujuan Kunkernya kali ini, yakni untuk mempercepat pembangunan berbagai bidang yang ada di Kabupaten Sukamara.

“Kunjungan kerja kali ini, saya ingin membantu Sukamara mempercepat pembangunan di berbagai



bidang, seperti infrastruktur, pariwisata, peternakan, perikanan, pendidikan, terkhusus pembangunan di bidang infrastruktur jalan, sehingga nanti jalur perjalanan barang pun lebih cepat, murah, dan lancar,” kata Gubernur Sugianto Sabran.

Lebih lanjut disampaikan Gubernur Sugianto terkait amanat Presiden RI Joko Widodo yang telah mempercayakan program lumbung pangan nasional kepada Kalteng. Pembangunan food estate tersebut penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalteng. Secara khusus Gubernur Sugianto pun berharap peternakan sapi yang berada di Kecamatan Pantai Lunci tersebut ke depannya juga dapat menjadi proyek percontohan nasional.

Selain itu, Gubernur Sugianto Sabran juga sempat menyinggung terkait bidang kesehatan, yaitu stunting dan pengendalian penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sukamara. “Hal ini harus kita lakukan pencegahan bersama agar generasi Kalimantan Tengah bisa tumbuh sehat dengan gizi yang baik dan terpenuhi. Maka dari itu, diperlukan anggaran khusus untuk ibu-ibu PKK dalam mendukung program pencegahan stunting,” ujar Gubernur Kalteng tersebut.

“Saya juga berpesan kepada Bupati beserta seluruh jajaran untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sukamara, namun juga sekaligus tetap menjalankan roda perekonomian, dengan menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak,” tegas Gubernur Sugianto Sabran lebih lanjut.

Dalam kesempatan yang sama pula, Bupati Sukamara Windu Subagio mengungkapkan ucapan terima kasih kepada Gubernur Kalteng atas kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sukamara. “Saat ini kita berada di Ranch Sukamara yang merupakan kebanggaan bagi

kami. Harapan kami, tentunya, dengan adanya ranch ini ke depannya bisa menjadi sentra utama penghasil daging secara nasional,” kata Bupati Sukamara.

Kemudian, acara pertemuan tersebut juga dirangkai dengan penyerahan sejumlah bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah oleh Gubernur Sugianto Sabran. Bantuan antara lain berupa 50.000 masker, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil dan balita sebanyak 50 dus, bantuan sosial untuk anak Panti Asuhan Ar Rahman di Sukamara sebanyak 10 kg per anak per 3 bulan, sejumlah buku umum dan PAUD untuk anak-anak PAUD, bibit 3 paket sayuran, serta 500

bibit pohon jeruk.

Usai melakukan pertemuan di Gasebo Sukamara Ranch, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran didampingi Bupati beserta seluruh jajaran kemudian melanjutkan kunjungan kerja untuk meninjau tambak udang yang berlokasi di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pantai Lunci. Tambak ini adalah klaster nasional bantuan dari Kementerian Kelautan Perikanan, berupa tambak udang seluas 5 Ha yang bermitra dengan Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) Mina Barokah sebagai pelaku utama budidaya.

Kabupaten Sukamara merupakan salah satu lokasi yang terpilih dari 5 lokasi secara nasional yang mendapatkan kegiatan prioritas KKP berupa klaster tambak udang untuk mencapai target peningkatan nilai ekspor udang nasional sebesar 250% hingga tahun 2024.

Selain tambak udang, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran juga melakukan peninjauan ke area Pelabuhan Kuala Jelai. Kunjungan kerja ke lokasi ini dalam rangka pembangunan infrastruktur yang direncanakan Gubernur Sugianto pada anggaran tahun mendatang. “Dari Pantai Lunci ke Kabupaten Sukamara itu ada sekitar 30 km jalan yang belum selesai. Mudah-mudahan nanti di anggaran tahun 2022 bisa dimasukkan dan diharapkan selesai pada tahun 2023,” pungkas Gubernur Kalteng Sugianto Sabran. (renn/win/dew/eka).



KUATKAN UPAYA WUJUDKAN LUMBUNG PANGAN NASIONAL, GUBERNUR KALTENG TINJAU KEMBALI LAHAN FOOD ESTATE DI DESA BELANTI SIAM

PANDIH BATU – BIRO ADPIM. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran melakukan kunjungan kerja (Kunker) dalam rangka peninjauan lahan pengembangan program Strategis Nasional (PSN) Food Estate di Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau pada Selasa (2/2/2021).

Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Gubernur Sugianto Sabran turut pula didampingi oleh Kapolda Irjen Pol Dedi Prasetyo dan Danrem 102/Pjh Brigjen TNI Purwo Sudaryanto. Kedatangan Gubernur beserta rombongan disambut oleh Wakil Bupati Pulang Pisau Pudjirustaty Narang dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.

Begitu tiba, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran langsung meninjau lahan-lahan pertanian di Desa Belanti Siam dengan berjalan kaki. Tampak terlihat di antaranya hamparan luas tanaman padi yang siap dipanen sekitar minggu ketiga bulan Februari 2021, seperti dilaporkan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sunarti. Sembari duduk di saung, Gubernur beserta rombongan juga sempat

berdiskusi mengenai perkembangan program Food Estate tersebut.

Pada kesempatan itu, Gubernur Sugianto Sabran menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalteng bersama Forkopimda untuk terus melakukan berbagai penguatan dalam upaya mendukung penuh keberhasilan program Food Estate, sehingga dapat dikembangkan menjadi Lumbung Pangan Nasional.

“Kami bersama Pak Kapolda dan Pak Danrem kembali meninjau lokasi Food Estate untuk melakukan berbagai peningkatan dan penguatan dalam membangun Lumbung Pangan Nasional. Kita terus meningkatkan dan menguatkan upaya-upaya untuk menyukseskan program nasional Food Estate ini,” tegas Gubernur Sugianto Sabran.

Tampak pula mendampingi Gubernur dalam peninjauan di Desa Belanti Siam tersebut, antara lain Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Shalahuddin, Kepala Biro Umum Lisda Arriyana, serta Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfoantik) Agus Siswadi.

Usai peninjauan di Desa Belanti Siam, Gubernur Sugianto Sabran bersama dengan Kapolda dan Danrem dijadwalkan melanjutkan kunjungan ke lahan Food Estate di Desa Bentuk Jaya A5, Kabupaten Kapuas. Setelahnya, Gubernur juga diagendakan untuk meninjau lokasi pengembangan komoditas Singkong di Kabupaten Gunung Mas. (set/fen).

GUBERNUR KALTENG TINJAU LOKASI PENGEMBANGAN PERKEBUNAN SINGKONG DI KABUPATEN GUNUNG MAS

SEPANG, GUNUNG MAS – BIRO ADPIM. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran melakukan kunjungan kerja (Kunker) dalam rangka meninjau langsung lokasi program pengembangan perkebunan komoditas singkong di Desa Tewai Baru, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas pada Selasa (2/2/2021).

Seperti diketahui, selain program Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas, Pemerintah Pusat juga telah memberi kepercayaan kepada Provinsi Kalteng untuk program cadangan pangan atau logistik strategis berupa pengembangan perkebunan singkong yang berada di wilayah Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas.

Setibanya di Desa Tewai Baru, kedatangan Gubernur Sugianto Sabran bersama dengan Kapolda Irjen Pol Dedi Prasetyo dan Danrem 102/Pjg Brigjen TNI Purwo Sudaryanto disambut oleh Bupati Gunung Mas Jaya S. Monong dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Gunung Mas serta Kepala Bidang Renkon Puskon Baranahan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Kolonel Czi Syamsul Bahri.

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran bersama Kapolda, Danrem 102/Pjg, dan Bupati Gunung Mas, serta rombongan lainnya kemudian melihat langsung tempat pembibitan singkong yang dilanjutkan dengan meninjau lahan yang diproyeksikan untuk penanaman singkong.

Dalam sesi wawancara usai peninjauan, Gubernur Sugianto menjelaskan mengenai pengembangan perkebunan singkong di Kabupaten Gunung Mas. "Ini kan proyek di bawah Pak Menhan, cadangan logistik strategis, kita siapkan. Kemarin kita berbicara waktu kita Ratas dengan Pak Presiden bahwa Pemerintah Kalimantan Tengah pada intinya siap kalau memang ditunjuk dan dipercaya. Dan akhirnya, Pak Presiden memberi kepercayaan kepada Kalimantan Tengah," jelas Gubernur.

Gubernur Sugianto selanjutnya mengajak seluruh elemen masyarakat Kalteng untuk bersikap optimis dan mendukung program pengembangan Food Estate dan perkebunan singkong tersebut. "Kita jangan pesimis, tapi mari kita optimis. Kalau sebelum kita kerjakan saja sudah pesimis, bagaimana mau sukses suatu pekerjaan," ungkap Gubernur.

"Saya yakin dengan tulus dan keikhlasan seluruh masyarakat



Kalimantan Tengah, Insya Allah, pasti akan baik hasilnya. Apalagi, memang Pak Presiden total untuk bahwa di Kalteng ini dicadangkan untuk lumbung pangan nasional dan juga cadangan logistik strategis," imbuh Gubernur Sugianto dengan optimis.

Gubernur pun yakin program-program pertanian strategis tersebut akan memberikan multiplier effects bagi perekonomian dan pembangunan Kalteng, termasuk terciptanya lapangan pekerjaan. "Ini penting. Satu (Food Estate) di bawah Pak Mentan, satu (perkebunan singkong) di bawah Pak Menhan, wehingga ini terbuka lapangan pekerjaan yang begitu

besar. Tinggal masyarakatnya kembali, harus mau menjadi petani, harus mau bekerja keras. Jangan malu jadi petani. Petani itu pekerjaan yang mulia," pungkas Gubernur.

Lebih lanjut, program perkebunan singkong di Kabupaten Gunung Mas ini nantinya akan dikembangkan menjadi industri dari hulu ke hilir, sehingga diharapkan dapat pula meningkatkan kesejahteraan, khususnya masyarakat sekitar. Kolonel Czi Syamsul Bahri menerangkan, "Singkong itu ada beberapa (produk), tepung, etanol, mie dari tepung singkong. Secara terintegrasi akan didirikan pabrik, organisasi penanam, dan sebagainya. Nanti semua terintegrasi di sini. Jadi, tenaga kerja bisa menanam, bisa di pabrik tepungnya, bisa pabrik makanannya."

Turut pula mendampingi Gubernur Kalteng dalam peninjauan di Desa Tewai Baru tersebut, di antaranya Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng Sri Suwanto dan Plt. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng Sutoyo. (set/eka).



GUBERNUR KALTENG DAMPINGI MENTAN TINJAU PANEN PERDANA PADI DI KAWASAN FOOD ESTATE DESA GADABUNG

PANDIH BATU – BIRO ADPIM. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran mendampingi Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI) Syahrul Yasin Limpo meninjau panen perdana padi di kawasan pengembangan Food Estate yang berada di Desa Gadabung, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau pada Rabu (10/2/2021).

Bertolak dari Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin dengan menggunakan helikopter, Mentan RI Syahrul Yasin Limpo tiba di Helipad Desa Gadabung sekitar pukul 13.15 WIB. Kedatangan Mentan RI beserta rombongan disambut oleh Gubernur Sugianto Sabran, Bupati Pulang Pisau Edy Pratowo, Danrem 102/Pjg Brigjen TNI Purwo Sudaryanto, dan Wakapolda Brigjen Pol Suryanbodo Asmoro, serta Forkopimda Kabupaten Pulang Pisau.

Tampak dalam rombongan yang menyertai Mentan RI, di antaranya Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan Suwandi, Dirjen Perkebunan Kasdi Subagyono, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Sarwo Edhy, serta Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Fadry Djufry.

Setelahnya, Mentan Syahrul Yasin Limpo didampingi Gubernur Sugianto Sabran, Bupati Edy Pratowo, dan rombongan kemudian langsung menuju lokasi panen perdana padi kawasan Food Estate di Desa Gadabung dengan menggunakan kendaraan mobil. Tiba di lokasi panen, Mentan Syahrul Yasin Limpo dan Gubernur Sugianto Sabran melihat langsung pemanenan padi yang dilakukan beberapa petani dengan memanfaatkan mesin Combine Harvester.

Dalam sambutannya, Gubernur Sugianto Sabran menyampaikan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan program Food Estate di Kalteng tahun 2020 berjalan cukup baik dan lancar. Tanaman padi yang sudah terpanen seluas 2.875 Hektare dari total yang sudah tertanam seluas 18.879 Hektare, dan tentunya setiap harinya ke depan akan terus bertambah.

“Di hari yang penuh berkah ini, kita akan melakukan panen padi secara bersama-sama dengan Kelompok Tani Rukun Sentosa, Desa Gadabung, Kecamatan Pandih Batu, seluas 250 Hektare, dengan Padi Inbrida dan Hibrida Varietas Unggul Baru,” kata Gubernur Sugianto Sabran.

Selanjutnya, Gubernur Sugianto menyatakan bahwa keberhasilan program Food Estate ini tentunya memerlukan proses dan juga dukungan dari seluruh elemen masyarakat. “Kelemahan dalam setiap pelaksanaan program kegiatan tentunya ada di sana sini, dan hal demikian itulah yang akan kita jadikan dasar untuk memperbaiki, saling melengkapi dalam kebersamaan, dengan tetap menanamkan niat yang tulus, demi pembangunan Kalimantan Tengah yang merupakan bagian dari Ketahanan Pangan Nasional,” ungkap Gubernur Sugianto.

Sementara itu, saat memberikan arahan, Mentan Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan bahwa kedatangannya kali adalah untuk melihat langsung



progres Food Estate di Kalteng dan sekaligus mengambil data sampel untuk pengembangan lebih lanjut. Mentan kemudian menegaskan bahwa keberhasilan pertanian, termasuk program Food Estate, pasti akan mendatangkan kesejahteraan bagi daerah dan masyarakatnya.

“Menjadi sebuah daerah dengan kekuatan pertanian yang baik pasti menjamin kesejahteraan petaninya. Kalau kesejahteraan petani yang umumnya adalah lapangan kerja terbesar sejahtera, maka sejahteralah desa itu, sejahteralah kecamatan itu, sejahteralah kabupaten, dan kemudian provinsi, dan seterusnya menjadi kesejahteraan negara,” tegas Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Pada kesempatan tersebut, dilakukan pula penyerahan secara simbolis Klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) masa tanam tahun 2020 kepada 4 Kelompok Tani di Desa Tahai Jaya, Kabupaten Pulang Pisau, senilai Rp 361.416.000 dengan luas kerusakan 88,8 Hektare. Hal ini dapat menjadi contoh bagi para petani atau kelompok tani yang terdaftar dalam asuransi akan dapat terhindar dari kerugian, meskipun terjadi gagal panen akibat serangan hama penyakit, puso, atau kekeringan.

Turut pula hadir dalam panen raya tersebut, di antaranya Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Kalteng Sunarti, Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalteng Syamsudin, serta beberapa Perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten terkait lainnya.

Selepas panen perdana di kawasan Food Estate yang terletak di Kabupaten Pulang Pisau ini, Mentan Syahrul Yasin Limpo didampingi Gubernur Sugianto Sabran beserta rombongan dijadwalkan untuk melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Sukamara dengan menggunakan helikopter guna meninjau langsung ranch atau peternakan sapi yang dikembangkan di sana. (set/bow).

Foto-Foto Kegiatan Pemprov. Kalteng



Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail Bin Yahya menghadiri Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri untuk Membahas Evaluasi Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020 serta Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan Periode Puncak Kemarau Tahun 2021 secara virtual melalui video conference, di Aula Jayang Tingang, Komplek Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya pada Selasa (9/2/2021).



Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri bersama dengan Kapolda Irjen Pol Dedi Prasetyo dan Danrem 102/Panju Panjung Brigjen TNI Purwo Sudaryanto beserta jajaran, melakukan kegiatan bantuan sosial pembagian masker dalam rangka pendisiplinan protokol kesehatan di wilayah Kalimantan Tengah, Rabu (03/02/2021).



Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri menghadiri Apel Kesiapan Tenaga Vaksinator dan Tracer Covid-19 di Lapangan Barigas Mapolda Kalteng, Kamis (11/2/2021).



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

mengucapkan

selamat

TAHUN BARU IMLEK

2572 Kongzili

12 Ferbuari 2021



H. SUGIANTO SABRAN
Gubernur Kalimantan Tengah



HABIB ISMAIL BIN YAHYA
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah



<http://biroadpim.kalteng.go.id/>



<http://www.facebook.com/SetdaProvKalteng/>



http://www.twitter.com/setda_kalteng



[@sekretariat.daerah.kalteng](https://www.instagram.com/@sekretariat.daerah.kalteng)



buletin.isenmulang@gmail.com